

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Indrawan Azis*¹, Nur Rachma²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Institut Teknologi Dan Bisnis Nobel Indonesia
Email : *¹Indrawan@stienobel-indonesia.ac.id, ²nurraema@nobel.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK) mampu berkontribusi dalam Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Model penelitian ini menggunakan data primer melalui tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan data sekunder dari sumber pencatatan tertulis dan dokumen lainnya. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan diungkap dengan menggunakan data yang diperoleh dari data Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2008 hingga tahun 2011. Pendapatan Daerah, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana perimbangan non DAU dan lain lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Abstract

This study aims to find out how much Local Own Revenue (PAD), Balancing Funds (Tax/Non-Tax Sharing, DAU and DAK) can contribute to Routine Expenditures and Development Expenditures. This research model uses primary data through question and answer with the leadership and employees of the Regional Financial Management Agency and secondary data from written records and other documents. The variables used in this study will be revealed using data obtained from data from the Sidenreng Rappang Regency Government from 2008 to 2011. Regional Income, referred to in this study are Regional Original Income, General Allocation Funds, non-DAU balancing funds and others. other. The data analysis technique used is descriptive quantitative.

1. Instruduction

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu masalah yang dihadapi hampir di seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai belanja rutin dan belanja pembangunan

berdasarkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di masing-masing daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. DAU
3. Dana Perimbangan Non DAU
4. Lain-lain penerimaan yang sah, sisa lebih perhitungan dan pinjaman.

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), hampir setiap daerah menunggu keputusan tentang besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh daerah, untuk dijadikan dasar menentukan kebijakan dalam penyusunan program-program daerah yang dituangkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan, karena pemerintah daerah merasa bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) sangat besar jumlahnya, sehingga terlambat dalam penetapannya. Sebagai salah satu daerah otonom di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan hasil survey awal, selama kurun waktu 3 tahun penatausahaan/tatakelola manajemen keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan daerah, hal ini dapat dilihat dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang memberikan opini kepada penyajian laporan keuangan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)” selama 3 tahun berturut-turut. Selain dari penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan sektor publik, Kabupaten Sidenreng Rappang juga selalu mengalami peningkatan belanja pegawai yang memakan porsi lebih besar dalam APBD dibandingkan dengan porsi belanja pembangunan. Peningkatan belanja pegawai yang lebih dominan dibanding dengan belanja pembangunan, hal ini akan berakibat peningkataan kesejahteraan masyarakat jauh dari harapan. Seharusnya sesuai dengan konsep pembangunan kesejahteraan masyarakat, porsi belanja pembangunan harus lebih besar dar pada belanja pegawai

HIPOTESIS

Hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah: “Diduga Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK) mampu berkontribusi terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang”

2. Methodology

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan membandingkan nilai nominal antara sumber pendapatan yang satu dengan sumber pendapatan yang lain dengan komponen belanja rutin dan belanja pembangunan.

Jenis dan Sumber Data

1. Data Kualitatif

Data yang diperoleh dari instansi yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Data Kuantitatif

Data yang diperoleh dari instansi yakni Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berupa data dalam bentuk angka-angka. Dan sumber data. Dan Sumber data yang di gunakan adalah dengan menggunakan data primeryang diperoleh dengan tanya jawab langsung dengan pimpinan atau pegawai dan

untuk data sekunder dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang di bahas.

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, adalah dengan cara Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Dengan metode ini diharapkan diperoleh data yang akurat. Dan metode kedua dengan teknik Dokumentasi yaitu dengan Pengumpulan data yang bersumber dari laporan-laporan tertulis, sehingga diperoleh data seperti sejarah singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, struktur organisasi, dan laporan keuangan (diakses dari www.sidenrengappangkab.go.id)

Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang ada yang telah dirumuskan dalam kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Yaitu dengan membandingkan nilai nominal antara sumber pendapatan yang satu dengan sumber pendapatan yang lain dengan komponen belanja rutin dan belanja pembangunan

3. Discussion

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap untuk tahun anggaran 2008-2011 secara ringkas dapat diuraikan pada table berikut ini:

Tabel 1: Komposisi APBD Kabupaten Sidrap tahun 2008-2011

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Surplus/Defisit
1	2008	468.684.667.781,84	508.130.280.222,45	-39.445.612.440,61
2	2009	462.809.628.892,12	526.645.591.040,11	-63.835.962.147,99
3	2010	553.699.955.531,88	492.974.943.511,35	60.725.012.020,53
4	2011	658.512.482.323,14	595.591.702.664,00	62.920.779.659,14

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Berdasarkan pada table di atas, bahwa terjadi peningkatan pendapatan daerah dari tahun ketahun. Sedangkan Belanja Daerah mengalami penurunan pada tahun 2009 dan naik kemudian naik pada tahun 2010 dan 2011. Defisit terjadi pada tahun 2008 dan 2009 sedangkan tahun 2010 dan 2011 sudah surplus.

Tabel 2: Analisis Pendapatan Dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2008

No	Uraian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Prosentase (%)
1	PAD	19.185.739.005,85	508.130.280.222,45	3,77
2	Dana Perimbangan	91.209.729.826,00	508.130.280.222,45	17,95
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	358.289.198.950,00	508.130.280.222,45	70,51
	Jumlah	468.684.667.781,84	508.130.280.222,45	

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Berdasarkan pada tabel di atas, pendapatan yang diperoleh dari Lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 70,51% terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan, disusul dengan sumber penerimaan dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK) memberikan kontribusi sebesar 17,95% dan paling rendah kontribusinya adalah PAD yang hanya sekita 3,77%.

Untuk tahun anggaran 2009 kontribusi pendapatan daerah terhadap belanjanya rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3: Analisis Pendapatan Dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2009

No	Uraian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Prosentase (%)
1	PAD	24.563.498.900,08	526.645.591.010,11	4,66
2	Dana Perimbangan	398.025.778.510,04	526.645.591.010,11	75,58
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40.220.351.482,00	526.645.591.010,11	7,64
	Jumlah	462.809.628.892,12	526.645.591.010,11	

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Dari tabel di atas pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan (Bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK) memberikan kontribusi sebesar 75,58% terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan.

Untuk tahun anggaran 2010 kontribusi pendapatan daerah terhadap belanjanya rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4: Analisis Pendapatan Dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2010

No	Uraian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Prosentase (%)
1	PAD	27.825.307.899,62	492.974.943.511,35	5,64
2	Dana Perimbangan	394.588.623.731,00	492.974.943.511,35	80,04
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	131.286.023.901,26	492.974.943.511,35	26,63
	Jumlah	553.699.955.531,88	492.974.943.511,35	

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Dari tabel di atas pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan (Bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK) memberikan kontribusi sebesar 80,04% terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan, berturut-turut lain-lain pemerinaan yang saha sebesar 20,63 %; dan PAD sebesar 5,64%.

Untuk tahun anggaran 2011 kontribusi pendapatan daerah terhadap belanjanya rutin dan belanja pembangunan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5 Analisis Pendapatan Dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2011

No	Uraian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Prosentase (%)
1	PAD	36.780.402.635,00	595.591.702.664,00	6,17
2	Dana Perimbangan	455.664.684.370,00	595.591.702.664,00	76,51
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	166.067.395.318,14	595.591.702.664,00	27,89
	Jumlah	658.512.482.323,14	595.591.702.664,00	

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada tabel di atas pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan (Bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK) memberikan kontribusi sebesar 76,51% terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan, berturut-turut lain-lain pemerinaan yang saha sebesar 27,89 %; dan PAD sebesar 6,17%.

Tabel 5 Analisis Pendapatan Dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 2011

No	Uraian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Prosentase (%)
----	--------	-------------------	----------------	----------------

1	PAD	36.780.402.635,00	595.591.702.664,00	6,17
2	Dana Perimbangan	455.664.684.370,00	595.591.702.664,00	76,51
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	166.067.395.318,14	595.591.702.664,00	27,89
	Jumlah	658.512.482.323,14	595.591.702.664,00	

Sumber: Pemda Kab. Sidrap dan Data Diolah, 2013

Berdasarkan hasil perhitungan seperti pada tabel di atas pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan (Bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK) memberikan kontribusi sebesar 76,51% terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan, berturut-turut lain-lain pemerinaan yang saha sebesar 27,89 %; dan PAD sebesar 6,17%.

4. Conclusion

Dana perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK) merupakan sumber penerimaan daerah yang paling besar kontribusny terhadap Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Sidrap,

Saran

Perlu adanya efisiensi anggaran belanja, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, Untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan DAU dan DAK) diupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang tidak memberatkan masyarakat, terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah, Perlunya pendirian badan usaha milik daerah (Perusda) yang relevan dengan kondisi kabupaten Sidrap sebagai daerah pertanian dan peternakan, untuk menunjang pendapatan asli daerah (PAD).

References

Arikunto, S., 2006, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta.

Bastian, Indra, 2003, *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta:Erlangga

_____, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Erlangga.

Baswir, Revrison, 2009, *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia* : BPFE : UMP AMP YPKN.

Kab. Sidrap Dalam Angka 2009, Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kab. Sidrap Dalam Angka 2010, Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kab. Sidrap Dalam Angka 2011, Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perda Kab.Sidrap Nomor 16 tahun 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah.
Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Undang-undang 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

www.sidenrengrappangkab.go.id

